



**PERATURAN KEPALA DESA
KARANGBAWANG**

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

**PORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
TANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DESA KARANGBAWANG TAHUN
ANGGARAN 2022**

DESA : KARANGBAWANG

KECAMATAN : REMBANG

KABUPATEN : PURBALINGGA



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 03 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 04 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 05 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 819);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018

- Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 04);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
 - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
 - 25 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Pengurus Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 77);
 - 26 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38);
 - 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 45);
 - 28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 - 29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62);
 - 30 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran ,Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 15);
 - 31 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 39);
 - 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi

- Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor);
- 33 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 103);
 - 34 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2017 Nomor 2);
 - 35 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 36 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2021 Nomor 4)
 - 37 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2021 Nomor 4);
 - 38 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

dan

KEPALA DESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGBAWANG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.232.270.000,00	1.608.436.328,00
2. Belanja Desa	Rp	2.297.335.332,00	1.625.190.524,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RP	836.600.932,00	712.406.544,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		876.464.300,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp		372.876.300,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	RP	18.730.900,00	18.728.680,00
		177.054.000,00	171.579.000,00
	Rp	388.485.200,00	349.600.000,00
Surplus/Defisit	Rp	(65.065.332,00)	16.754.196,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.065.332,00	65.065.332,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	65.065.332,00	65.065.332,00
SILPA	Rp	0,00	48.311.136,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangbawang.

Ditetapkan di : Karangbawang
Pada tanggal : 31 Januari 2023



Diundangkan di : Karangbawang
Pada tanggal : 31 Januari 2023

SEKERTABIS DESA

SUWAR, A.Md.

LEMBARAN DESA KARANGBAWANG TAHUN 2023 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 30 Januari 2023

Nomor : 005 /
Hal : Undangan

Kepada Yth,
Bpk :
Di -
Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Selasa, 31 Januari 2023

Waktu : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Kepala Desa
Karangbawang Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu


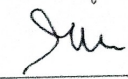
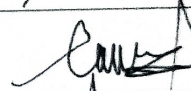
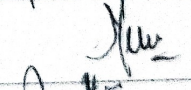

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang

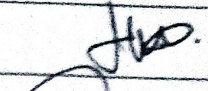
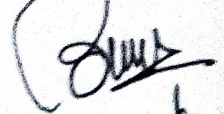
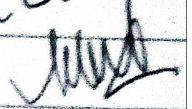
TOYO

RRDAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 31 Januari 2023
 Pukul : 08:00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Karangbuaras
 Acara : Laporan Pertanggungjawaban Panitia APUDS 1A 2022

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A.Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONOISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGAT	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	<i>Runtiah</i>
19	HADIROH	Kader Posyandu	<i>Hadiroh</i>
20	PRAYITNO	Perswakilan Kelompok Masyarakat Miskin	<i>Prayitno</i>
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	<i>Sri Rahayu</i>
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	<i>Ruliyati</i>
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	<i>Rokhmadi</i>
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	<i>Irwan Sutiono</i>
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	<i>Kisnoto</i>
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	<i>Sugeng P</i>
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	<i>Samiarji</i>
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	<i>Machidin</i>
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	<i>Sutarjo Santo</i>
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	<i>Sutoyo</i>
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	<i>Marto Diarto</i>
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	<i>Senon</i>
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	<i>Suhud Nur S.</i>
34	YUDIANTO MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	<i>Yudianto Muslim</i>
35	MUJIARTO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	<i>Mujiarto Suhem</i>
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	<i>Sutiono Karsim</i>
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	<i>Maryono Slamet</i>
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	<i>Muhamad Suyono</i>
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	<i>Wardim Surahman</i>
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	<i>Evi Riani</i>

41	JATNO	Penggiat Desa/Pe	
42	BAYU WIRA SAPUTRA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	
43	WAHYUDI	LKMD	

KEPALA DESA
KARANGBAWANG


TOYO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl. Sapunagara, Karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356,
web.sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

BERITA ACARA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022 DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
PURBALINGGA

Pada Hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan Kepala Desa Karangbawang No 01 Tahun 2023 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Karangbawang
Pada tanggal 31 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua BPD

AZIS AMINUDIN

Kepala Desa Karangbawang


TOYO

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Tempat : Kantor Desa Karangbawang
Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Kepala Desa
Karangbawang Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022

Hasil rapat :

Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.
4. Kelembagaan Desa Karangbawang
5. Unsur Masyarakat Desa Karangbawang.

Hasil Musyawarah :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesiat tahun 1945.

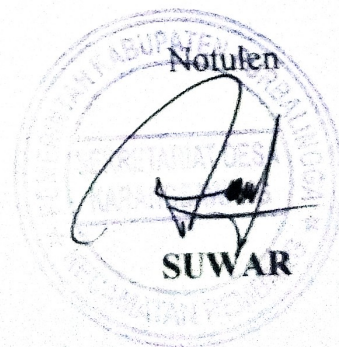


FOTO KEGIATAN



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KEURANGI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.605.000,00	11.105.000,00	3.500.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	14.605.000,00	11.105.000,00	3.500.000,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	14.605.000,00	11.105.000,00	3.500.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.217.265.000,00	1.597.265.000,00	620.000.000,00
	4.2.1.	Dana Desa	800.018.000,00	800.018.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	800.018.000,00	800.018.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.270.000,00	27.270.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	27.270.000,00	27.270.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	659.977.000,00	659.977.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	659.977.000,00	659.977.000,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	305.000.000,00	5.000.000,00	300.000.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	305.000.000,00	5.000.000,00	300.000.000,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	425.000.000,00	105.000.000,00	320.000.000,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	425.000.000,00	105.000.000,00	320.000.000,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	66.328,00	333.672,00
	4.3.6.	Bunga Bank	400.000,00	66.328,00	333.672,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	400.000,00	66.328,00	333.672,00
		JUMLAH PENDAPATAN	2.232.270.000,00	1.608.436.328,00	623.833.672,00
	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>836.600.932,00</u>	<u>712.406.544,00</u>	<u>124.194.388,00</u>
		<u>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan</u>	<u>680.630.932,00</u>	<u>679.636.544,00</u>	<u>1.194.388,00</u>
		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan</u>	<u>71.800.000,00</u>	<u>71.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Kepala Desa</u>	<u>71.800.000,00</u>	<u>71.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
	5.1.	Belanja Pegawai	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00
	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00
	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00
	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
	5.1.2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	527.692.100,00	527.692.100,00	0,00
	5.1.2.	Belanja Pegawai	527.692.100,00	527.692.100,00	0,00
	5.1.2.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00
	5.1.2.2.	Tunjangan Kepala Desa	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00
	5.1.2.3.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	433.492.100,00	433.492.100,00	0,00
	5.1.2.3.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	320.212.100,00	320.212.100,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	113.280.000,00	113.280.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.794.000,00	37.796.220,00	2.220,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	37.794.000,00	37.796.220,00	2.220,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	37.794.000,00	37.796.220,00	2.220,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	14.776.800,00	14.779.020,00	(2.220,00)
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.545.200,00	2.545.200,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.432.000,00	18.432.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	21.644.832,00	20.813.224,00	831.608,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.644.832,00	20.813.224,00	831.608,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.495.310,00	5.430.000,00	65.310,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.435.910,00	4.370.900,00	65.010,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	276.000,00	276.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	783.400,00	783.100,00	300,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.200.000,00	400.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.600.000,00	4.200.000,00	400.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.779.522,00	5.413.224,00	366.298,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	379.522,00	13.224,00	366.298,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	11.100.000,00	10.735.000,00	365.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	10.735.000,00	365.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	11.100.000,00	10.735.000,00	365.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	3.300.000,00	2.935.000,00	365.000,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	126.220.000,00	6.220.000,00	120.000.000,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	126.220.000,00	6.220.000,00	120.000.000,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	126.220.000,00	6.220.000,00	120.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERBEDAAN (Rp)	
1	2	3	4	5	
1.2.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan			
1.2.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Sdr	42.189.750,00	0,00	42.189.750,00
1.2.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Meubelair dan Aksesoris	4.887.500,00	0,00	4.887.500,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	37.302.250,00	0,00	37.302.250,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	84.830.250,00	6.220.000,00	77.810.250,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	43.610.000,00	6.220.000,00	37.390.000,00
1.2.3	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	34.420.250,00	0,00	34.420.250,00
1.3		Administrasi Kependudukan, Pematatan Sipil,	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.	Desa (Dipilih)	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Perlengkapan	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	(Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Perlengkapan	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	(RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Perlengkapan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	876.464.300,00	372.876.300,00	503.588.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	29.621.500,00	26.486.500,00	3.135.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan	19.486.500,00	19.486.500,00	0,00
2.1.1	5.2.	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	19.486.500,00	19.486.500,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	2.686.500,00	2.686.500,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.686.500,00	2.686.500,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00

		KERANGKA ANGGARAN (Rp.)	REVISI/AMENDEMEN (Rp.)	REVISI/AMENDEMEN (Rp.)
		1	2	3
1.1.1.01	Belanja Jasa Konsultansi/Service/Manajemen/Kelembagaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.02	Penelitian/Hasil/Program Penelitian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.03	Perencanaan/Hasil/Manajemen/Kelembagaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.04	Belanja Mula	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.05	Belanja Mula Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.06	Belanja Mula Perawatan dan Perbaikan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.07	Pedagogik/Perawatan/Kelembagaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	3.000.000,00	1.130.000,00
1.1.1.09	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.130.000,00	3.000.000,00	1.130.000,00
1.1.1.10	Belanja Belanja Berencana/Kelembagaan/Kelembagaan	3.130.000,00	3.000.000,00	1.130.000,00
1.1.1.11	Sub Bidang Kesehatan			
1.1.1.12	Penyelenggaraan Psa Kesehatan (Jasa/Perawatan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan)	83.853.000,00	83.853.000,00	0,00
1.1.1.13	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.14	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.15	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00
1.1.1.16	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.1.1.17	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.1.1.18	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.1.19	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.1.20	Penyelenggaraan Penyuluhan (Mkn Tambahan, Kls Bsmil, Lamela, Insentif)	71.553.000,00	71.553.000,00	0,00
1.1.1.21	Belanja Barang dan Jasa	71.553.000,00	71.553.000,00	0,00
1.1.1.22	Belanja Barang Perlengkapan	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
1.1.1.23	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
1.1.1.24	Belanja Jasa Honorarium	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
1.1.1.25	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
1.1.1.26	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
1.1.1.27	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
1.1.1.28	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
1.1.1.29	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
1.1.1.30	Belanja Barang Perlengkapan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
1.1.1.31	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
1.2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.499.000,00	200.046.000,00	400.453.000,00
2.1.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	300.341.000,00	0,00	300.341.000,00
2.1.11.1	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.11.1.1	Belanja Barang Perlengkapan	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2.1.11.1.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
2.1.11.1.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	560.000,00	0,00	560.000,00

KODE BIK		URAIAN	Revisi 2023		
1	2		2023 (Rp)	2023 (Rp)	2023 (Rp)
2.3.11	5.2.5	Belanja Pendidikan Dasar			
2.3.11	5.2.5.01	Belanja Pendidikan Dasar Dalam Kabupaten/Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.3.11	5.2.5.02	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.3.11	5.2.5.03	Belanja Modal Jalan/Persarana Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.3.11	5.2.5.03.01	Belanja Modal Jalan - Uprah Tempa Keras	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.3.11	5.2.5.03.02	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.3.11	5.2.5.03.03	Belanja Modal Jalan - Biaya Perawatan	0,00	0,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Persarana Jalan Desa (Sering, selain dll)	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.3.14	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.3.14	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium PKMD dan PKMD	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.3.14	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.3.14	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
2.3.14	5.3.1	Belanja Modal Jalan/Persarana Jalan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
2.3.14	5.3.1.02	Belanja Modal Jalan - Uprah Tempa Keras	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.3.14	5.3.1.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
2.3.14	5.3.1.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.14	5.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.3.14	5.3.2.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Al	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Blatai Masyarakat (Dipilih)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.3.15	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.3.15	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.3.15	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uprah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.3.15	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2.3.15	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.17		Pembuatan/Peremajaan Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.17	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.3.17	5.2.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.3.17	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
2.3.17	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.4.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.4.1	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.4.1	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diberikan kepada	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>2.490.000,00</u>	<u>2.490.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.2		<u>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</u>	<u>2.490.000,00</u>	<u>2.490.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.730.900,00</u>	<u>18.728.680,00</u>	<u>2.220,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1		<u>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>12.730.900,00</u>	<u>12.728.680,00</u>	<u>2.220,00</u>
3.4.2		<u>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</u>	<u>3.840.000,00</u>	<u>3.840.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
3.4.3		<u>Pembinaan PKK</u>	<u>8.890.900,00</u>	<u>8.888.680,00</u>	<u>2.220,00</u>
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.890.900,00	8.888.680,00	2.220,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.830.900,00	5.828.680,00	2.220,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	240.000,00	237.780,00	2.220,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	420.900,00	420.900,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>177.054.000,00</u>	<u>171.579.000,00</u>	<u>5.475.000,00</u>
4.1		<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	<u>6.624.000,00</u>	<u>6.624.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.5		<u>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</u>	<u>6.624.000,00</u>	<u>6.624.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00
4.1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00
4.1.5	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00
4.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.759.000,00	3.759.000,00	0,00
4.1.5	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	3.759.000,00	3.759.000,00	0,00
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>165.430.000,00</u>	<u>159.955.000,00</u>	<u>5.475.000,00</u>
4.2.1		<u>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</u>	<u>165.430.000,00</u>	<u>159.955.000,00</u>	<u>5.475.000,00</u>
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.230.000,00	72.755.000,00	5.475.000,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	57.330.000,00	51.855.000,00	5.475.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	13.280.000,00	10.030.000,00	3.250.000,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	44.050.000,00	41.825.000,00	2.225.000,00
4.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
4.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	900.000,00	900.000,00	0,00
4.2.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.2.1	5.3.	Belanja Modal	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00
4.2.1	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
4.2.1	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
4.2.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
4.2.1	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.90		Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
4.3.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
4.3.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
4.3.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	388.485.200,00	349.600.000,00	38.885.200,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.085.200,00	29.200.000,00	38.885.200,00
5.1.0		Penanggulangan Bencana	68.085.200,00	29.200.000,00	38.885.200,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.085.200,00	29.200.000,00	38.885.200,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	68.085.200,00	29.200.000,00	38.885.200,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	68.085.200,00	29.200.000,00	38.885.200,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.297.335.332,00	1.625.190.524,00	672.144.808,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(65.065.332,00)	(16.754.196,00)	(48.311.136,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			65.065.332,00	65.065.332,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	48.311.136,00	(48.311.136,00)

Karangbawang, 04 May 2023

